

Policy Brief

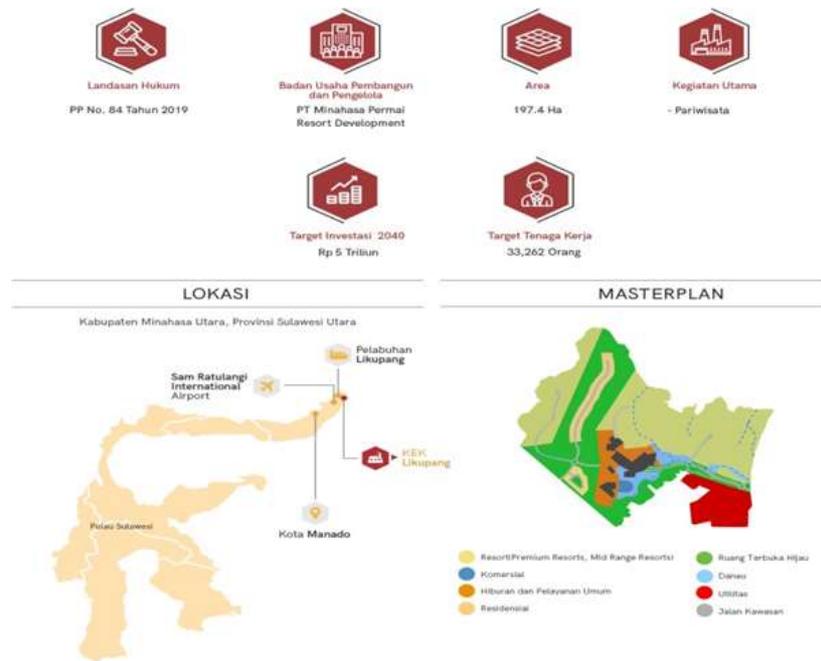
Peningkatan Kapabilitas Perangkat Daerah di Kecamatan Likupang Sulawesi Utara dalam Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Vishnu Juwono, Adiwarman, Althof Endawansa, Violitas Sinda Arinda, Juditha Danuvanya

Salah satu daerah yang saat ini mendapat perhatian pemerintah adalah Kecamatan Likupang, Provinsi Sulawesi Utara. Daerah Likupang termasuk ke dalam five top priority destinations oleh Pemerintah Indonesia, bersamaan daerah wisata indah lainnya seperti Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Provinsi Jawa Tengah, Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, 2019). Kelima daerah tersebut menjadi wisata prioritas yang pengembangannya dipercepat oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir ini (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, 2019). Proses pengembangan tersebut juga dibuktikan melalui penyediaan anggaran sejumlah Rp 9,34 triliun pada 2020 untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, hotel, kawasan komersial, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, Likupang juga ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam upaya menarik investor asing (Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, 2019). Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang juga diresmikan melalui Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2019 (BPK RI, 2019). Pemerintah terdorong untuk meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang berlokasi di Tanjung Pulisan, Sulawesi Utara karena memiliki potensi yang sangat tinggi dalam ranah pariwisata. Hal ini terlihat dari keunggulan geostrategis wilayah yang memiliki pantai dan berdekatan dengan Wallace Conservation Center, berdekatan dengan Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung (Firmansyah, 2021).

Selain itu, daya tarik yang dimiliki Likupang juga berasal dari keindahan hamparan pantainya, seperti Pantai Paal di Desa Morinsow, Pantai Kalinaun di Desa Kalinaun, dan Pantai Pulisan di Desa Pulisan. Pantai-pantai tersebut sudah mendapat perhatian dari wisatawan mancanegara yang berasal dari Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok dan menjadi wisata yang kerap dikunjungi disana (Indi News, 2021). Dengan keunggulan yang sedemikian rupa, konsep KEK yang diusung di Likupang ini juga berupaya untuk mengembangkan resort kelas menengah dan premium, pengenalan kekayaan budaya sekitar, dan pengembangan Wallace Conservation Center (Firmansyah, 2021). Persiapan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus ini juga didukung oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola melalui PT Minahasa Permai Resort Development dengan target area seluas 197,4 Ha (Firmansyah, 2021). Tenaga kerja yang dilibatkan diperkirakan sejumlah 33.262 orang dengan target investasi pada 2040 mencapai 5 triliun rupiah (Firmansyah, 2021).

Skema Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang sudah dirancang ditampilkan dalam foto di bawah ini.



Gambar 1. Profil Kawasan Ekonomi Khusus Likupang
Sumber : kek.go.id (2019)

Adanya penunjukan Kecamatan Likupang sebagai KEK membuat Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masuk akan semakin meningkat guna menunjang kondisi ekonomi yang dinamis. Pemerintah pusat sendiri mengalokasikan dana desa untuk Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan di tahun 2022 sebesar Rp.1,09 triliun (Indi News, 2021). Dari total alokasi TKDD tersebut ditetapkan sebesar Rp. 13,25 triliun, terdiri dari DAU Rp8,03 triliun, DBH Rp. 570,33 miliar, DAK Fisik Rp1,76 triliun, DAK Non Fisik Rp1,69 triliun, Dana Insentif Daerah Rp. 106,60 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp. 1,09 triliun. Sementara itu, APBN 2022 yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 8,87 triliun, berupa DIPA yang diserahkan kepada 452 Satker Negara/Lembaga di Sulawesi Utara (Indi News, 2021). Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Octaviamus Estefanus Kandouw, menyatakan bahwa alokasi harus dimanfaatkan oleh bupati dan wali kota secara maksimal demi pemulihan ekonomi post-covid. Gerigi pendanaan desa akan menyorot pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa bagi pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Penggunaan dana desa tahun 2022 semakin terfokus pada program prioritas nasional dengan beberapa kegiatan yang menjunjung tinggi SDGs yang dapat berkontribusi dalam merangkai sebuah Kawasan Ekonomi Khusus yang ideal (Indi News, 2021). Pengembangan desa struktural yang disiapkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara, terutama pada Kecamatan Likupang akan mendorong pemanfaatan pariwisata kelautan yang memang menjadi sihir tersendiri dalam menjaring wisatawan untuk singgah dan menikmati keindahan alam yang disuguhkan.

Disinilah kita dapat mengambil sebuah sorotan utama bahwa Pemerintah Sulawesi Utara terutama Kecamatan Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sudah memiliki keseriusan dalam menggapai indikator SDGs demi kemajuan beraskan kelestarian alam oleh Bangsa Indonesia. Lalu, SDGs nomor berapakah yang sebenarnya patut disasar untuk melanggengkan pembangunan sebuah daerah yang mengemban program prioritas nasional dengan kewajiban untuk mendekap kelestarian lingkungan? Pastinya, sebuah kolaborasi serta ikatan hubungan dengan berbagai stakeholder akan sangat menguntungkan bagi keberlangsungan gerigi pemerintahan Kecamatan Likupang. Rajutan partnership dalam pemerintahan sendiri sangat menyengol nilai SDGs nomor tujuh belas yang menggaris bawahi sebuah ikatan kemitraan erat sebagai indikator pencapaian cita-cita global. Sebuah hubungan kemitraan pastinya sangat didambakan oleh setiap bangsa atau negara untuk menggapai impian bersama. Biasanya konsep yang digunakan ialah collaborative governance sebagai dasar utama kolaborasi dalam menyelenggarakan serta menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan. collaborative governance terutama dalam konteks lingkungan hidup menyorot semua pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan untuk merangkai ruang lestari bagi alam agar dapat berkembang, tetapi tetap menjunjung tinggi konsep pembangunan berkelanjutan (Taylor, 2012). Konsep hubungan kemitraan ini juga tidak bisa berjalan tanpa hadirnya kemitraan global. Kemitraan Global demi pembangunan yang efektif sendiri berperan sebagai kendaraan multi- stakeholder utama untuk mendongkrak efektivitas pembangunan dengan menyatukan beberapa negara atau organisasi, masyarakat, dan tentunya stakeholder terkait untuk pembangunan berkelanjutan (GPDEC, 2020). Kecamatan Likupang juga erat dengan kehidupan bahari yang asri sehingga implementasi SDGs keempat belas menjadi cukup relevan bagi daerah tersebut. SDGs seputar pemanfaatan kehidupan laut tidak boleh dilupakan oleh pemerintahan. Indikator ini berfungsi untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan (Ntona, Mrogera & Elisa, 2017). Selain itu, poin SDGs kedelapan terkait penyediaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan pertumbuhan ekonomi juga menjadi suatu hal yang penting. Mengingat, Likupang yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat memberikan proyek lapangan kerja kepada 33.262 orang. Hal ini juga diarahkan agar Likupang meraih target investasi 2040 senilai 5 triliun.

Dengan pelabelan Kecamatan Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, tentunya segala potensi harus dimaksimalkan agar menghasilkan sebuah kawasan yang menguntungkan. Potensi terbesar yang memang terlihat dari Kecamatan Likupang ialah dalam sektor kemaritiman serta potensi bahari. Posisi Likupang yang geostrategis membuat cetak biru dari KEK Likupang menyorot perencanaan dalam berbagai pembangunan berbasis kelautan. Namun, dalam proses pembangunan, konsep pelestarian alam seringkali dilupakan begitu saja. Implementasi sebuah konsep penyeimbangan dengan kapasitas lingkungan seharusnya menjadi langkah penting demi menjaga keselarasan lingkungan dan individu yang tinggal di dalamnya. Disinilah konsep *blue economy* akan ambil peran dalam mengintegrasikan berbagai permintaan dengan tidak melupakan kelestarian alam Nusantara. Konsep *blue*

economy atau ekonomi biru sendiri berarti menempuh sebuah optimalisasi sumber daya air untuk meningkatkan performa ekonomi melalui kegiatan yang inovatif dengan tetap menjamin budidaya sumber daya kelautan (Kreamer, 2017; Sotiriadis & Shen, 2020). Konsep ini memiliki implikasi positif secara konsep dalam membangun sebuah daerah yang berbasis kemaritiman. Tak hanya mendorong maksimalisasi produksi sumber daya laut, konsep ekonomi biru juga dapat menjadi acuan untuk mendorong performa pariwisata di Likupang. Berbagai rencana pembuatan resort sampai berbagai situs pariwisata lain harus memperhatikan kelestarian alamnya sesuai dengan konsep ekonomi biru.

Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis pada 2017, menunjukkan hanya 6,39 persen terumbu karang dalam kondisi sangat baik. Sementara itu, terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 23,40 persen, kondisi cukup sebesar 35,06 persen, dan kondisi buruk sebesar 35,15 persen. Hasil ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan Indonesia (Fajar, 2018). Lebih jauh lagi, Sulawesi Utara (Sulut) sebagai daerah yang sebagian wilayahnya merupakan lautan memiliki tak kurang dari 18.439,75 Ha terumbu karang. Hampir setengah dari jumlah tersebut atau seluas 8.325,51 hektar kini berada dalam ancaman kerusakan (Ikanubun, 2019). Berdasarkan data dari Atlas Monitoring Terumbu Karang di Kawasan Konservasi 2015-2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Luas Ekosistem Terumbu Karang (Ha) di Kepulauan Sulawesi adalah 894,076.88 Ha dengan Luas Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi (Ha) sebesar 163,373 Ha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Hal ini membuat Kepulauan Sulawesi memiliki persentase kawasan konservasi dan ekosistem terumbu karang terbesar di Indonesia yaitu 18,27%. Di samping itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah serta masyarakat dalam hal konservasi wilayah laut untuk menjaga serta menyelamatkan ekosistem laut termasuk terumbu karang dari kerusakan.

Adanya permasalahan ekosistem laut di wilayah Sulawesi Utara juga meningkatkan urgensi penerapan poin keempat belas SDGs terkait pentingnya menjaga kawasan ekosistem laut. Hal ini juga menjadi persiapan bagi Likupang dan Kota Manado yang menjadi kandidat terkuat sebagai lokasi pelaksanaan World Beach Games 2023 (Ayudiana, 2022). Berdasarkan penilaian Haider Farman selaku Technical Director Association of National Olympic Committee, Likupang dan Kota Manado menjadi kandidat terkuat dengan persentase penilaian senilai 90% sangat puas akan lokasi dan keindahan pantai-pantai yang ada di lokasi tersebut (Ayudiana, 2022). Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk meyakinkan ANOC bahwa Likupang dan Kota Manado pantas untuk menyelenggarakan kompetisi bergengsi berskala internasional tersebut. Hal ini juga menjadi tantangan dan kewajiban bagi pemerintah, untuk tetap optimal dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di Likupang diimbangi dengan menjaga kelestarian ekosistem laut. Harmonisasi upaya pemerintah tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kawasan Likupang yang asri dan meningkatkan atraksi dan minat wisatawan dalam negeri dan mancanegara.

Berdasarkan analisis situasi diatas dapat disimpulkan terdapat permasalahan yang dihadapi Kecamatan Likupang Timur terkait dengan penguatan *blue economy* dan penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait konsep *blue economy* dan penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh sebab itu, tim UI membuat program pengabdian masyarakat yang bertemakan “Upaya Penguatan *Blue Economy*: Pendampingan Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada masyarakat dan perangkat daerah di Kecamatan Likupang Timur, Sulawesi Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”.

Berdasarkan hasil dari *pre test* dan *post test* serta evaluasi program melalui kuesioner kepada perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022 berhasil untuk meningkatkan upaya peningkatan *blue economy*, memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah serta bagaimana menerapkan SDGs di Kecamatan Likupang Timur. Mayoritas jawaban yang diberikan perangkat daerah pada *pre test* dan *post test* menunjukkan peningkatan pemahaman dan dorongan untuk melakukan kolaborasi dalam penyelesaian masalah khususnya mengenai pengelolaan sampah, SDGs dan *blue economy*.

Selain masalah pemahaman, penerapan pengelolaan sampah, SDGs dan *blue economy* di Kecamatan Likupang Timur juga mengalami hambatan. Hambatan yang ditemui antara lain belum tersedianya TPS di beberapa tempat di Likupang Timur sehingga terjadi pencemaran lingkungan, belum adanya peraturan yang mengatur khusus mengenai TPS, kurangnya koordinasi antara aparat di Kabupaten dan Kecamatan Likupang Timur mengenai pengelolaan sampah, penerapan SDGs dan juga *blue economy*. Tentunya berbagai permasalahan tersebut akan berakibat buruk terhadap Kecamatan Likupang Timur. Terlebih, di Likupang Timur terdapat KEK dan daerah tersebut difokuskan untuk kegiatan pariwisata.

Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan KEK Likupang sebagai DPSP yakni:

1. Pemerintah Pusat sudah memberikan landasan hukum yang jelas berkenaan dengan pembangunan dan pengembangan KEK Likupang sebagai DPSP kelima. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten perlu menyiapkan perangkat hukum pelaksana.
2. Pembangunan dan pengembangan KEK Likupang sebagai DPSP kelima mencakup partisipasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang (*collaborative governance*).
3. Peran Swasta merupakan bentuk kemitraan yang didorong ke arah pembangunan dan pengembangan KEK Likupang sebagai DPSP selain infrastruktur dan fasilitas penunjang, yakni penyediaan fasilitas kepariwisataan.
4. Pembangunan dan pengembangan KEK Likupang sebagai DPSP dikaitkan dengan standar global *Sustainable Development Goals*. Konsep pembangunan KEK Likupang sebagai DPSP merujuk pada *blue economy*

yang menjaga kelestarian kehidupan biota, flora dan fauna bawah air. Untuk kehidupan di daratan, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dan melibatkan masyarakat untuk mengelola sampah dan menjaga kebersihan.

5. Pembangunan dan pengembangan KEK Likupang sebagai DPSP harus menjadikan masyarakat sebagai subjek dimana hasilnya kembali kepada masyarakat.
6. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang massif oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah kepada masyarakat di Kecamatan Likupang Timur. Hal ini dilakukan guna menjaga lingkungan Likupang Timur dari pencemaran dan tetap dapat menjadi daerah pariwisata yang nyaman untuk dikunjungi.
7. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu dibuat peraturan khusus dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai TPS. Hal ini diperlukan agar terdapat regulasi yang jelas sebagai dasar penganggaran, pelaksanaan, maupun acuan untuk pengadaan dan pengelolaan sampah di Likupang Timur. Aparat di lapangan juga akan tergerak untuk mengadakan TPS dan mengelolanya dengan baik jika ada regulasi yang jelas mengatur hal tersebut.
8. Pemerintah, masyarakat, swasta dan akademisi perlu berkolaborasi secara berkelanjutan baik dalam pengelolaan sampah, penerapan SDGs, penguatan *blue economy* dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak demi menciptakan pembangunan Kecamatan Likupang Timur berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudiana, Shofi. (2022, February 7th). ANOC tinjau kelayakan Indonesia untuk gelar World Beach Games 2023. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2689157/anoc-tinjau-kelayakan-indonesia-untuk-gelar-world-beach-games-2023>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI. (2019). KEK Likupang. Diakses melalui <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Likupang>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). ATLAS MONITORING TERUMBU KARANG di Kawasan Konservasi 2015-2021. Diakses melalui <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/ATLAS%20TERUMBU%20KARANG.pdf>
- Fajar, Jay. (2018, May 9th). Inilah Kondisi Beberapa Terumbu Karang Indonesia. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2018/05/09/inilah-kondisi-beberapa-terumbu-karang-indonesia/>
- Firmansyah, A. (2021). Analisis Deskriptif Potensi Pariwisata di Desa Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(2), 160-173.
- GPDEC. (2020, September 22). GPED At A Glance. Retrieved from [effectivecooperation.org: https://effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership#:~:text=The%20Global%20Partnership%20for%20Effective,prosperity%20and%20peace.%22%20It%20brings](https://effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership#:~:text=The%20Global%20Partnership%20for%20Effective,prosperity%20and%20peace.%22%20It%20brings)
- Ikanubun, Yoseph. (2019, April 10th). Ribuan Hektare Terumbu Karang di Sulut Terancam Rusak. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/3937493/ribuan-hektare-terumbu-karang-di-sulut-terancam-rusak>
- Indi News. (2021, Desember 3). Alokasi Dana Desa Sulut Tahun 2022 Rp.1,09 Triliun. Retrieved from [indimanado: https://www.indimanado.com/2021/12/alokasi-dana-desa-sulut-tahun-2022.html](https://www.indimanado.com/2021/12/alokasi-dana-desa-sulut-tahun-2022.html)

- JDIH BPK RI. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Likupang. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127705/pp-no-84-tahun-2019>
- Kraemer, A. (2017). A Sustainable Ocean Economy, Innovation and Growth: A G20 Initiative. Centre for International Governance Innovation, 6-7.
- Ntona, M., Morgera, & Elisa. (2017). Connecting SDG 14 with the other Sustainable Development Goals through marine spatial planning. Elsevier.
- Sotiriadis, M., & Shen, S. (2020). Blue Economy and sustainable tourism management in coastal zones: Learning from experiences. Diakses melalui <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/634731/adbi-wp1174.pdf>
- Taylor, B. a. (2012). Conceptualizations of Local Knowledge in Collaborative Environmental Governance. *Geoforum*, 1207–1217.